

# Efektivitas kunjungan belajar dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan bagi pemangku kepentingan program kolaborasi pengelolaan hutan desa di lanskap Semenanjung Kampar Provinsi Riau

Miswadi

Eco Nusantara Lestari

Jl. Burangrang No.16 RT 04 RW 03 Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

JAWA BARAT [16128]

Email: [miswapratama@econusantara.org](mailto:miswapratama@econusantara.org)

*Kajian ini belum dipublikasikan secara ilmiah*

## ABSTRAK

Pengelolaan hutan desa (HD) merupakan suatu sistem pengelolaan hutan lestari yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha. Memang pengelolaan hutan desa ini belum mampu dilakukan secara tunggal oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), tetapi di sisi lain, pengelolaan kolaboratif masih memiliki tantangan untuk dilakukan. Peningkatan pengetahuan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan desa secara kolaboratif masih dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendekatan kunjungan belajar dalam meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan hutan desa di lanskap Semenanjung Kampar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Subyek penelitian adalah partisipan kunjungan belajar yang merupakan representatif dari pengurus LPHD, Pemerintah Desa dan Lembaga Mitra pengelola hutan desa di lanskap Semenanjung Kampar. Hasil refleksi kunjungan belajar menunjukkan bahwa partisipan memperoleh pemahaman yang baik mengenai tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha. Perbandingan secara kualitatif antara *Product* dan *Context* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kunjungan belajar adalah efektif dalam meningkatkan pengetahuan partisipan terhadap tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha untuk pengelolaan hutan desa. Koordinasi yang terbangun baik antara LPHD dan Pemerintah Desa serta Lembaga Mitra dapat mengembangkan kemampuan pengelolaan kolaboratif dan memperkuat integrasi pengalaman kunjungan belajar ke dalam kolaborasi pengelolaan hutan desa di tingkat tapak.

**Kata Kunci:** *kunjungan belajar, pengelolaan kolaboratif, hutan desa, Semenanjung Kampar*

## PENDAHULUAN

Lanskap Semenanjung Kampar di Provinsi Riau merupakan ekosistem gambut yang terdapat hutan tropis di dalamnya. Hutan tropis ini memiliki keanekaragaman hayati tinggi yang menopang kehidupan spesies satwa liar terancam punah termasuk Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) (RER, 2018; Zulkarnain *et al.*, 2023). Meskipun demikian, upaya membangun perekonomian nasional ditengarai mengancam eksistensi ekosistem di lanskap ini. Salah satunya menjadi wilayah produksi hutan tanaman industri April Group (Aminah, 2017). Adanya hutan desa di wilayah ini dimaksudkan untuk mempertahankan kelestarian hutan yang penting bagi perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta untuk menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya (Amri dan Susanto, 2020). Sebaran hutan desa pada lanskap Semenanjung Kampar dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tasik Besar Serkap seluas 11.239 Ha, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran hutan desa di lanskap Semenanjung Kampar Provinsi Riau

No	Sebaran Hutan Desa	Luas (Ha)	No. SK	Pengelola	Lembaga Mitra
1.	Desa Segamai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan	2270	SK.1012/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017	LPHD Segamai	Yay. Mitra Insani
2.	Desa Serapung Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan	1956	SK.1011/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017	LPHD Serapung	Yay. Mitra Insani
3.	Kampung Teluk Lanus Kec. Sungai Apit Kab. Siak	3580	SK.6702/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017	LPHD Kampung Teluk Lanus	Yay. Mitra Insani

4.	Kampung Rawa Mekar Jaya Kec. Sungai Apit Kab. Siak	3433	SK.4587/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/7/2020	LPHD Kampung Rawa Mekar Jaya	Yay. Mitra Insani
----	---	------	---	---------------------------------	-------------------

Sumber: KPH Tasik Besar Serkap (2024)

Yayasan Mitra Insani merupakan lembaga mitra yang mendampingi pengelolaan hutan desa di wilayah ini sejak proses awal pengusulannya. Kerja-kerja sosial Yayasan Mitra Insani bersama masyarakat desa dalam pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat di lanskap Semenanjung Kampar telah ditunjukkan dengan diperolehnya persetujuan hutan desa sebagai ruang hak kelola rakyat terhadap kawasan hutan yang mengusung semangat keadilan (Martin, 2020). Hal ini seyogyanya dapat diikuti dengan pola pengelolaan yang bijak oleh para pemangku kepentingan.

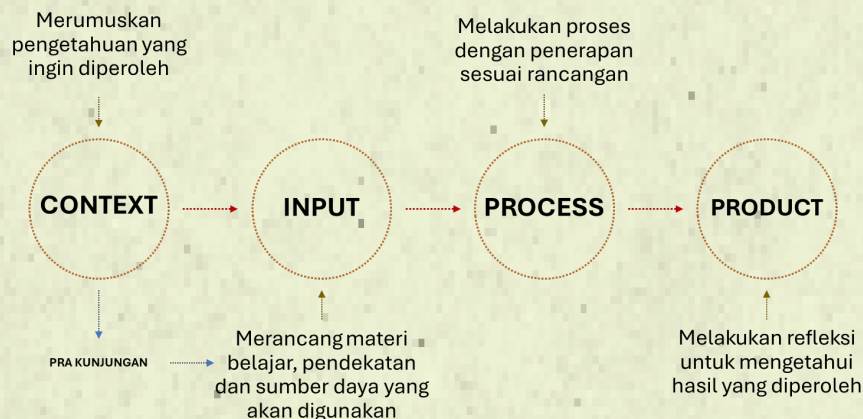
Hutan desa sebagai salah satu skema dalam perhutanan sosial memiliki tantangan cukup besar dalam pengelolaannya, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha (Gusliana, 2022), termasuk pengelolaan hutan desa di lanskap Semenanjung Kampar Provinsi Riau. Masyarakat yang telah mendapat persetujuan hak kelola hutan desa di wilayah ini memiliki persepsi bahwa hutan desa belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat rendahnya pemahaman terhadap tata kelolanya dan rendahnya keterlibatan Pemerintah Desa dalam pengelolaannya. Persepsi ini muncul karena pengelolaan hutan desa hanya menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) sehingga keberhasilan pengelolaannya ditentukan oleh sikap proaktif lembaga ini. Menurut Yuniati dan Santosa (2018), pengelolaan hutan desa sebagai suatu sistem pengelolaan hutan lestari yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu dilakukan secara tunggal oleh LPHD dalam mencapai hakikat tujuan pengelolaan perhutanan sosial berkelanjutan dana ada ruang bagi pengelolaan kolaboratif. Meski demikian, Adnan *et al.* (2015) menyatakan bahwa keterlibatan para pihak dalam konsep pengelolaan kolaboratif belum mampu diterima dengan baik di kalangan pengelola maupun antar pemangku kepentingan.

Pengelolaan kolaboratif dan kesuksesan dalam pengelolaan hutan desa perlu belajar dari daerah lain yang dipandang lebih maju dan berhasil. Hal ini dapat mendorong motivasi pengelola dan para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam pengelolaan hutan desa sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Kunjungan belajar menjadi suatu pendekatan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan hutan desa terutama LPHD dan Pemerintah Desa. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengetahuan mengenai pengelolaan hutan desa, masyarakat pengelola hutan desa di lanskap Semenanjung Kampar melakukan kunjungan belajar ke Dusun Lubuk Beringin yang diselenggarakan melalui program kolaborasi Yayasan Mitra Insani, EcoNusantara Lestari dan April Group (EcoNusantara Lestari, 2023).

Dusun Lubuk Beringin merupakan salah satu daerah yang setara dengan desa, sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam wilayah Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, dan berada dalam lanskap hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba). Desa ini merupakan salah satu desa pertama di Indonesia yang memperoleh persetujuan hak kelola hutan desa tahun 2009. Indikasi keberhasilan pengelolaan hutan desa ditunjukkan melalui tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha. Desa ini telah berhasil memperoleh program imbal jasa berbasis karbon sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 melalui pengelolaan hutan desa dengan didampingi lembaga mitranya, Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi sejak tahun 2006 hingga saat ini (KKI Warsi, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kunjungan belajar dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan bagi pemangku kepentingan terkait pengelolaan hutan desa di lanskap Semenanjung Kampar ke Dusun Lubuk Beringin yang diharapkan dapat meningkatkan peran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan kolaboratif hutan desa.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2017). Subyek penelitian sebanyak 15 orang partisipan kunjungan belajar dari unsur LPHD, Pemerintah Desa dan Lembaga Mitra. Waktu penelitian telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 selama berlangsungnya kegiatan kunjungan belajar di Dusun Lubuk Beringin. Pengumpulan data menggunakan teknik *participant observation* dengan alat ukurnya adalah lembar pengamatan (Hasanah, 2016). Penyajian dan analisis penelitian ini mengadopsi pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang merupakan salah satu model evaluasi yang dikembangkan Stufflebeam tahun 1966 untuk mengevaluasi program pembelajaran dalam empat ruang lingkup meliputi *Context, Input, Process*, dan *Product* (Ambiyar dan Muharika, 2019; Kurniawati, 2021; Winaryati *et al.*, 2021; Rahayu dan Aly, 2023). Pendekatan CIPP yang dikembangkan di dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model deskripsi kunjungan belajar yang mengadopsi pendekatan CIPP (Sumber: Ambiyar dan Muharika, 2019; Kurniawati, 2021; Winaryati *et al.*, 2021; Rahayu dan Aly, 2023)

Analisis terhadap efektivitas kunjungan belajar sebagai pendekatan dalam meningkatkan pengetahuan dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian secara kualitatif *performance* dimensi *Context* pada *Product* (Winaryati *et al.*, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Context

Perumusan pengetahuan yang ingin diperoleh partisipan melalui kunjungan belajar merujuk pada konsep pengelolaan hutan desa sebagai salah satu skema perhutanan sosial di Indonesia. Pengetahuan yang dibutuhkan ini diperoleh dari survei kebutuhan terhadap partisipan sebelum kunjungan belajar yang meliputi tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha. Kebutuhan pengetahuan yang ingin diperoleh ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator dan kriteria pengetahuan yang ingin diperoleh dalam proses kunjungan belajar mengenai pengelolaan hutan desa

No	Indikator Pengetahuan	Kriteria Pengetahuan
1.	Tata kelola kelembagaan	Pengelolaan organisasi pengelola hutan desa, keterlibatan organisasi lainnya dalam pengelolaan hutan desa dan relasi LPHD dengan Pemerintah Desa
2.	Tata kelola kawasan	Pendekatan yang dilakukan lembaga pengelola hutan desa dalam melakukan pengamanan hutan desa
3.	Tata kelola usaha	Pengelolaan potensi ekonomi yang dikembangkan lembaga pengelola hutan desa untuk meningkatkan kesejahteraan

Tabel 2 menunjukkan pengetahuan dasar yang teridentifikasi dibutuhkan dalam pengelolaan hutan desa. Aspek kelembagaan merupakan struktur hubungan dan tatanan yang dapat mengikat satu sama lain sehingga tata kelola kelembagaan menjadi aspek penting agar organisasi dapat berjalan dengan baik (Djogo *et al.*, 2003). Aspek kelola kawasan difokuskan pada kelola kawasan bentang lahan agar tetap terjaga kelestarian lingkungan dan pengamanan kawasan hutan (Apriandana *et al.*, 2021). Aspek kelola usaha merupakan upaya menghasilkan pendapatan melalui pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan produk yang berkelanjutan (Riane, 2019). Pengetahuan ketiga tata

kelola ini menjadi sangat penting dalam pengelolaan hutan desa menuju pengelolaan yang progresif (Martin, 2020) dan kolaboratif (Yuniati dan Santosa, 2018).

## 2. Input

Pengetahuan yang dibutuhkan partisipan ditindaklanjuti dengan merancang materi, pendekatan dan sumber daya sebagai *Input* dalam kunjungan belajar dan tersusun dalam suatu Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). KAK ini dapat disamakan dengan kurikulum/silabus dalam pendidikan formal yang menjadi acuan tenaga pendidik dalam melakukan proses belajar terhadap peserta didik. Hal ini karena KAK menjadi acuan melakukan perubahan khususnya peningkatan pengetahuan partisipan dalam pengelolaan hutan desa melalui kunjungan belajar. Materi dan pendekatan belajar serta sumber daya yang dipersiapkan untuk kunjungan belajar ini disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Materi dan pendekatan belajar serta sumber daya yang dipersiapkan untuk kunjungan belajar mengenai pengelolaan hutan desa

No	Indikator Pengetahuan	Pokok-pokok Materi Pengetahuan	Pendekatan Belajar	Sumber Daya (Narasumber)
1.	Tata kelola kelembagaan	Struktur organisasi LPHD dan tupoksi; Pengelolaan keuangan; Relasi LPHD dan Desa (hubungan organisasi dan manfaat ekonomi); Pengelolaan KUPS; dan Kolaborasi multipihak	Materi ruangan	Lembaga Mitra Pemerintah Dusun LPHD
2.	Tata kelola kawasan	Sistem pengamanan dan operasionalisasinya; Struktur organisasi pengamanan; Unsur-unsur para pihak yang terlibat dalam pengamanan areal; dan Sarana prasarana pendukung	Materi ruangan <i>Field trip</i>	Lembaga Mitra LPHD
3.	Tata kelola usaha	Jasa lingkungan; Perdagangan karbon; Ekowisata; Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Agroforestry; dan Multi usaha	Materi ruangan <i>Field trip</i>	Lembaga Mitra KUPS BUMDus

Penyusunan pokok-pokok materi pengetahuan yang menjadi *Input* dalam kunjungan belajar dikembangkan dari kebutuhan pengetahuan yang teridentifikasi sebagai *Context*. Untuk merancang *Input* dilakukan pra kunjungan sebagai survei awal oleh tim penyelenggara sehingga diperoleh informasi dasar dan kesiapan daerah kunjungan (EcoNusantara Lestari, 2023). Materi pengetahuan yang diharapkan ini dapat diperoleh dari sumber daya manusia yang ada di daerah kunjungan belajar dan telah dikomunikasikan kesediaannya. Hal ini karena daerah kunjungan belajar memiliki potensi pengetahuan yang dibutuhkan sehingga dapat berbagi pengalaman dalam pengelolaan hutan desa dengan melibatkan interaksi timbal balik. Menurut Lumbantobing (2011), interaksi komunikasi antar masyarakat dalam desiminasi pengetahuan sebagai bentuk berbagi pengetahuan antar komunitas menghendaki adanya kesediaan saling bertukar informasi dan pengetahuan sehingga memberikan peluang terciptanya pengetahuan baru.

Kompetensi sumber daya manusia sebagai narasumber dan pendamping *field trip* yang sesuai dengan materi pengetahuan yang dirancang merupakan aspek penting dalam berbagi pengetahuan ini. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah representatif dari unsur-unsur kelembagaan yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan hutan desa di Dusun Lubuk Beringin, meliputi Lembaga Mitra, Pemerintah Dusun, LPHD, kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus). Hal ini sejalan dengan pandangan pendidikan kritis Mansour Fakhri (Rifa'i, 2019) bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui belajar dari realitas atau pengalaman seseorang atau keadaan nyata masyarakat yang keabsahannya ditentukan oleh pembuktian dalam realitas tindakan atau pengalaman langsung.

Selanjutnya dalam proses kunjungan belajar menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (Bathin, 2006) melalui diskusi interaktif dan praktik lapang. Hal ini untuk mendorong peserta menjadi aktif dalam proses kunjungan belajar agar memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan. Menurut Syarif (2011), unsur pembelajaran yang penting yang harus diperhatikan untuk memastikan pembelajaran orang dewasa berjalan dengan efektif adalah terlibat aktifnya para partisipan dalam proses belajar. Keaktifan partisipan melibatkan diri dalam proses belajar dipengaruhi oleh situasi yang diciptakan. Zubaidi (2019) menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran orang dewasa perlu menciptakan situasi dimana orang dewasa diperlakukan secara baik dan dihargai dengan memberikan

kesempatan mengemukakan pikiran dan pengalamannya sehingga dapat melakukan pelibatan diri dalam proses belajar. Sejalan dengan itu, Sunhaji (2013) menyatakan bahwa dalam pendidikan orang dewasa perlu menciptakan model belajar yang partisipatif selain mendiagnosis kebutuhan belajar dan merumuskan tujuan belajar yang jelas.

### 3. Process

Pada *Process*, rancangan materi dan pendekatan belajar serta sumber daya diimplementasikan selama kunjungan belajar dengan menggunakan dua pendekatan, meliputi materi ruangan dan *field trip*. Sumber daya manusia yang dilibatkan sebagai narasumber dalam pendekatan materi ruangan meliputi enam unsur kelembagaan yang merepresentasikan kelembagaan yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan hutan desa di Dusun Lubuk Beringin. Materi dan pendekatan belajar serta sumber daya manusia dalam kunjungan belajar pada sesi materi ruangan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Materi belajar yang disampaikan melalui pendekatan materi ruangan dalam kunjungan belajar mengenai pengelolaan hutan desa

No	Narasumber & Materi	Indikator & Materi Pengetahuan		
		Tata kelola kelembagaan	Tata kelola kawasan	Tata kelola usaha
1.	KKI Warsi <ul style="list-style-type: none"> <li>Peran penting KKI Warsi dalam pendampingan di Lubuk Beringin</li> <li>Kontribusi Perhutanan Sosial terhadap Aksi Mitigasi &amp; Adaptasi Perubahan Iklim</li> </ul>	Profil KKI Warsi dan perhutanan sosial, struktur LPHD, pembagian peran pengurus, penyusunan rencana kerja, penguatan peran gender, pembentukan kelembagaan usaha, dan penyusunan <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP)	Serangkaian inisiasi lapangan, skenario proyek dan monitoring, proses pendampingan legalitas wilayah (pengusulan hutan desa), dan perlindungan kawasan hutan desa dan zonasi	Survei potensi, Studi kelayakan usaha, penyusunan rencana usaha, pendampingan permodalan dan akses pasar, HD Bujang Raba pilot project REDD+ model komunitas dan rangkaian prosesnya, serta distribusi manfaat
2.	Ketua LPHD <ul style="list-style-type: none"> <li>Profil LPHD Ndendang Hulu Sako Batang Buat</li> </ul>	Tugas pokok dan fungsi LPHD, struktur pengurus beserta tugas dan tanggung jawabnya	Profil bentang alam hutan desa, SOP Patroli, aktivitas patroli dan penandaan batas, video singkat aktivitas patroli	Pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
3.	Ketua FK-PHBM <ul style="list-style-type: none"> <li>Profil Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (FK-PHBM) Bujang Raba</li> </ul>	Sejarah forum, Asas dan tujuan, struktur pengurus beserta tugas dan tanggung jawab	Fasilitasi Tim Patroli LPHD di Bujang Raba, video singkat sosialisasi Peraturan Bersama Rio tentang FK-PHBM dan <i>sharing</i> pembelajaran Tim Patroli LPHD	-
4.	Ketua-ketua KUPS <ul style="list-style-type: none"> <li>Profil KUPS Sako Makmur &amp; KUPS Imbao Beringin</li> </ul>	Latar belakang pembentukan KUPS, dan struktur kepengurusan	-	Rencana kelola usaha, dan pola kegiatan usaha yang dilakukan
5.	Ketua Pokdarwis <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekowisata Lubuk Beringin</li> </ul>	Latar belakang, struktur kepengurusan dan tugas Pokdarwis	Daya tarik wisata dan fasilitasnya	Potensi ekowisata dan dokumentasi kegiatan-kegiatan wisata
6.	Datok Rio Lubuk Beringin <ul style="list-style-type: none"> <li>Peran dan Keterlibatan Pemerintah Dusun Lubuk Beringin</li> </ul>	Profil Dusun Lubuk Beringin, dukungan anggaran untuk LPHD, mengkoordinasikan lembaga-lembaga di Lubuk Beringin dalam pengelolaan hutan desa	Latar belakang hutan desa dan pengembangan desa	Kontribusi hutan desa terhadap kemajuan Dusun Lubuk Beringin

Kesesuaian materi pengetahuan secara kualitatif pada *Context* dan *Input* diimplementasikan pada *Process*. Pada pendekatan materi ruangan, penyampaian materi pengetahuan dilakukan oleh narasumber kompeten yang merepresentasikan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan hutan desa di Dusun Lubuk Beringin. Adanya pengalaman yang dimiliki narasumber pada kategori orang yang setara atau sama-sama dewasa dan berada dalam kelembagaan yang sama jenisnya, dapat mendorong perubahan rasa percaya diri sehingga dapat mendorong perubahan perilaku partisipan. Menurut Budiawan (2018), kesetaraan individu dalam proses belajar orang dewasa mendorong

perubahan pengetahuan dan rasa percaya diri sebagai perubahan sikap mental sehingga mendorong perubahan perilaku.

Proses dan suasana diskusi berlangsung secara interaktif. Diskusi interaktif tidak hanya terjadi antara partisipan dengan narasumber, melainkan juga melibatkan masyarakat anggota LPHD setempat yang ikut serta mengikuti diskusi. Partisipan menjadi aktif dalam proses diskusi karena kebutuhan untuk menyerap dan mendapatkan pengetahuan yang diinginkan. Hal ini juga sebagaimana Sunhaji (2013) yang menyatakan bahwa dalam proses pendidikan orang dewasa tidak didasarkan pada pertimbangan narasumber selaku penyampai materi pengetahuan yang dipersepsikan sebagai pendidik, melainkan atas dasar kebutuhan partisipan sebagai peserta didik.

Selanjutnya, dalam proses kunjungan belajar dilakukan kegiatan *field trip* untuk mengetahui lebih dekat mengenai tata kelola kawasan dan tata kelola usaha yang juga menyertakan tata kelola kelembagaan. Partisipan dapat menyerap pengetahuan dengan lebih baik melalui pendekatan ini. Pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan *field trip* disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan *field trip* dalam kunjungan belajar mengenai pengelolaan hutan desa

No	Komponen Pengetahuan	Pokok-pokok materi pengetahuan yang diperoleh	
		<i>Field trip</i> ke areal hutan desa	<i>Field trip</i> ke tempat pengelolaan usaha kopi
1.	Tata kelola kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penanggung jawab jelas, SOP diikuti dan adanya Surat Perintah Tugas (SPT) patroli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi pengembangan aturan bagi hasil usaha untuk distribusi manfaat</li> </ul>
2.	Tata kelola kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penandaan batas areal hutan desa sudah dilakukan, dan potensi ancaman terhadap pengelolaan hutan desa masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan tanaman kopi memiliki potensi dikembangkan dengan pola agroforestri</li> </ul>
3.	Tata kelola usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi ekonomi berbasis hutan desa masih banyak dan dapat lebih dieksploasi lagi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi pengembangan usaha kopi masih terbuka untuk berbagai bentuk produk</li> </ul>

Tabel 5 menunjukkan pengetahuan yang diperoleh partisipan dari kemampuan cara berpikirnya yang mandiri dalam menilai temuan-temuan pengetahuan melalui *field trip*. Sejalan dengan itu, Zubaedi (2013) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang salah satunya melalui peningkatan kapasitas pengetahuan dilakukan menciptakan perubahan kualitatif masyarakat dalam kemandirian cara berpikir, bersikap dan mengambil keputusan.

Dalam melakukan *field trip* ke areal hutan desa, partisipan didampingi oleh Tim Patroli LPHD Ndendang Hulu Sako Batang Buat. Untuk kegiatan *field trip* ke tempat pengelolaan usaha kopi, partisipan didampingi oleh KKI Warsi. Melalui *field trip* ini, partisipan memperoleh pengetahuan yang lebih optimal sesuai tujuan yang diharapkan. Menurut Rahayu (2016), *field trip* merupakan metode belajar dimana partisipan diajak mengunjungi objek tertentu dengan maksud belajar yang lebih terikat oleh tujuan dan tugas belajar melalui pendampingan pihak yang dipandang menguasai materi dan objek. Selain itu, *field trip* ini telah disusun secara terencana untuk dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tujuannya. Menurut Sudarmanto (2020), penyelenggaraan *field trip* yang terencana dan terorganisasi dengan baik terhadap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi menjadi faktor yang turut menentukan keberhasilannya.

#### 4. Product

Refleksi dilakukan di akhir proses sehingga diketahui pengetahuan yang telah diperoleh partisipan selama kunjungan belajar. Refleksi dilakukan dengan pendekatan diskusi *brainstorming* menggunakan pertanyaan yang dikembangkan dari *Context*. Hasil refleksi kunjungan belajar disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil refleksi terhadap pengetahuan partisipan dalam kunjungan belajar mengenai pengelolaan hutan desa

No	Komponen & Kriteria Pengetahuan	Pokok-pokok Pikiran Hasil Refleksi Kunjungan Belajar
1.	Tata kelola kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan organisasi pengelola hutan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekompakan kelembagaan menjadi kunci keberhasilan</li> <li>• Adanya pembuktian kebermanfaatn hutan desa</li> <li>• Adanya integrasi pengelolaan hutan desa dalam pembangunan desa</li> </ul>

- Keterlibatan organisasi lainnya dalam pengelolaan hutan desa
  - Relasi LPHD dengan Pemerintah Desa
2. Tata kelola kawasan
- Pengamanan hutan desa oleh LPHD
3. Tata kelola usaha
- Pengelolaan potensi ekonomi oleh LPHD
- Adanya dukungan anggaran pengelolaan hutan desa
  - Sikap saling mendukung antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan
  - Lembaga mitra merupakan advisor pengelolaan hutan desa
  - Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dusun menjadi dasar pengelolaan hutan desa
  - Kejelasan penandaan batas areal hutan desa
  - Adanya dukungan anggaran untuk patroli
  - Memiliki kelengkapan SOP dan SPT dalam patroli
  - Adanya pendokumentasian patroli dalam bentuk *Logsheets*
  - Kelengkapan legalitas formal bagi KUPS dalam mengelola usaha
  - Potensi ekonomi pengembangan ekowisata yang masih terbuka
  - Imbal jasa berbasis karbon yang sudah berjalan
  - Pola agroforestri yang masih berkembang
  - Kehati-hatian dalam mengembangkan pola agroforestri
  - Kebutuhan analisis potensi pengembangan ekonomi
  - Pengelolaan usaha oleh KUPS dan lembaga ekonomi desa
  - Kejelasan hubungan kelola usaha antara KUPS dan LPHD

Tabel 6 menunjukkan hasil refleksi partisipan (*Product*) yang mencerminkan komponen dan kriteria pengetahuan sebagaimana yang diharapkan (*Context*). Proses refleksi dilakukan dalam suasana yang interaktif antar partisipan sehingga dapat mengeksplorasi temuan-temuan pengetahuan selama kunjungan belajar mengenai tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha dalam pengelolaan hutan desa. Hasil refleksi ini dipengaruhi sikap aktif partisipan dalam mengikuti proses kunjungan belajar pada diskusi interaktif dan *field trip*. Hal ini menunjukkan adanya pembelajaran partisipatif yang berjalan selama kunjungan belajar. Menurut Turrohmah (2016), keaktifan warga belajar merupakan faktor internal yang mendukung implementasi pembelajaran partisipatif. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang mendukung kunjungan belajar sebagai bagian dari pendidikan partisipatif sehingga partisipan dapat memperoleh pengetahuan sesuai yang diharapkan, diantaranya: (1) keberterimaan masyarakat dan pengelola hutan desa serta pemerintah desa setempat, (2) partisipan tinggal di rumah penduduk setempat selama kunjungan belajar sehingga dapat mengeksplorasi sejarah pengelolaan hutan desa, dan (3) adanya peran lembaga mitra yang memfasilitasi proses penyelenggaraan. Hal ini menunjukkan adanya suasana harmonis yang terbangun selama kunjungan belajar. Menurut Rahmat (2018), terjadinya hubungan yang akrab diantara partisipan mendorong pendekatan partisipatif menjadi efektif dalam komunitas belajar. Sejalan dengan itu, Wulandari (2020) menyatakan bahwa pendidikan partisipatif membantu mengembangkan potensi yang dimiliki partisipan untuk melakukan perubahan dengan menjadikan pengalaman sebagai landasannya.

### 5. Efektivitas kunjungan belajar dalam meningkatkan pengetahuan

Pengukuran efektivitas kunjungan belajar secara kualitatif dalam meningkatkan pengetahuan partisipan menggunakan pendekatan CIPP dengan mencermati kesesuaian antara *Product* terhadap *Context*. Ketercapaian antara *Product* terhadap *Context* yang kesesuaiannya diukur secara kualitatif menunjukkan efektivitas pendekatan kunjungan belajar dalam meningkatkan pengetahuan partisipan. Kesesuaian kunjungan belajar dalam meningkatkan pengetahuan partisipan mengenai pengelolaan hutan desa melalui pendekatan CIPP disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kesesuaian kunjungan belajar dalam meningkatkan pengetahuan yang dideskripsikan menggunakan pendekatan CIPP

Gambar 2 menunjukkan adanya kesesuaian antara hasil yang dicapai pada refleksi (*Product*) dengan pengetahuan yang dibutuhkan partisipan (*Context*) melalui kunjungan belajar yang didukung oleh kesesuaian pada *Input* dan *Process*. Secara spesifik, kesesuaian ini dapat dilihat dari perbandingan secara kualitatif hasil refleksi kunjungan belajar (Tabel 6) dan indikator/kriteria pengetahuan yang ingin diperoleh partisipan (Tabel 2). Hasil *checklist* kesesuaian *Product* terhadap *Context* disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil *checklist* kesesuaian *Product* terhadap *Input* dalam kunjungan belajar mengenai pengelolaan hutan desa

No	Komponen Pengetahuan & Indikator	Context	Product	Keterangan
1.	Tata kelola kelembagaan			
	• Pengelolaan organisasi pengelola hutan desa	✓	✓	Sesuai
	• Keterlibatan organisasi lainnya dalam pengelolaan hutan desa	✓	✓	Sesuai
	• Relasi LPHD dengan Pemerintah Desa	✓	✓	Sesuai
2.	Tata kelola kawasan			
	• Pengamanan hutan desa oleh LPHD	✓	✓	Sesuai
3.	Tata kelola usaha			
	• Pengelolaan potensi ekonomi oleh LPHD	✓	✓	Sesuai

Ketercapaian antara *Product* terhadap *Context* pada kunjungan belajar masyarakat pengelola hutan desa di lanskap Semenanjung Kampar ke Dusun Lubuk Beringin mengenai pengelolaan hutan desa menunjukkan bahwa pendekatan kunjungan belajar adalah efektif dalam meningkatkan pengetahuan partisipan terhadap tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha. Hal ini karena hasil refleksi dapat menunjukkan tingkat pengetahuan partisipan yang diperoleh selama kunjungan belajar yang ketercapaiannya secara kualitatif dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan indikator pengetahuan yang diinginkan partisipan.

Indikator dan kriteria pengetahuan (*Context*) merupakan pengetahuan yang diharapkan dapat diperoleh partisipan melalui pendekatan kunjungan belajar untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan hutan desa. Menurut Kurniawati (2021), mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi kelembagaan dalam menjalankan programnya melalui identifikasi kebutuhan sebagai suatu *Context* mendorong perbaikan di tahapan berikutnya. Sejalan dengan itu, Jaya dan Ndeot (2018) menyatakan bahwa *Context* mencoba memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti dari suatu keadaan yang dihadapi sehingga mendorong mengatur keputusan pada tahap *Input*.



Identifikasi terhadap pengetahuan yang dibutuhkan (*Context*) menjadi dasar dipersiapkannya *Input* yang dapat menggambarkan suatu perubahan. Menurut Winaryati *et al.* (2021), *Input* membantu menentukan program guna melakukan perubahan yang dibutuhkan. Sejalan dengan itu, Ambiyar dan Muharika (2019) menyatakan bahwa *Input* turut menentukan keberhasilan capaian hasil belajar dimana *Input* dipersiapkan dengan memperhatikan *Context*.

Pada dimensi *Process* kunjungan belajar dilaksanakan selaras dengan *Context* dan *Input* sehingga tujuan peningkatan pengetahuan melalui kegiatan kunjungan belajar dapat tercapai. Pada *Process* yang menggunakan pendekatan materi ruangan, partisipan diberikan materi pengetahuan sesuai dengan *Context*. Sedangkan pada *Process* yang menggunakan pendekatan *field trip*, partisipan telah memberikan umpan balik pengetahuan yang diperoleh sesuai dengan *Context*. Hasil refleksi partisipan (*Product*) dari kunjungan belajar menunjukkan perubahan yang baik terhadap pengetahuan pengelolaan hutan desa. Hal ini karena *Input* dan *Process* yang sesuai dengan *Context* sehingga menghasilkan *Product* yang sesuai dengan *Context*. Menurut Rahayu dan Aly (2023), kemampuan model CIPP adalah mampu melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh aspek *Context*, *Input*, *Process* dan *Product*.

Pada dimensi *Product*, partisipan kunjungan belajar memperoleh pengetahuan penting mengenai pengelolaan hutan desa kolaboratif yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan hutan desa di Dusun Lubuk Beringin yaitu kekompakan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan desa diwujudkan dalam peran nyata pengelolaan. LPHD memiliki RKPS sebagai acuan untuk berperan aktif dalam pengelolaan hutan desa dan membangun kolaborasi dengan para pihak. Komitmen Pemerintah Dusun dituangkan dalam RPJM Dusun untuk memberikan dukungan anggaran dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga di tingkat desa. Lembaga Mitra mengimplementasikan perannya berdasarkan konsensus yang dibangun sejak awal bersama masyarakat dan pemerintah setempat. Peran para pihak dilakukan dalam implementasi tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha.

## **KESIMPULAN**

1. Refleksi pada model CIPP dapat menunjukkan peningkatan kapasitas pengetahuan partisipan secara kualitatif dari suatu proses kunjungan belajar yang dipengaruhi adanya penerapan pendidikan partisipatif.
2. Kunjungan belajar yang menerapkan pendidikan partisipatif adalah efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat pengelola hutan desa kolaboratif di Lanskap Semenanjung Kampar terhadap tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha.

## **SARAN**

1. LPHD, Pemerintah Desa dan Lembaga Mitra diharapkan mampu membangun koordinasi yang baik sehingga dapat mengembangkan kemampuan pengelolaan kolaboratif dan memperkuat integrasi pengalaman kunjungan belajar ke dalam kolaborasi pengelolaan hutan desa di tingkat tapak.
2. LPHD, Pemerintah Desa dan Lembaga Mitra diharapkan dapat membangun sikap saling percaya dalam menunjukkan peran masing-masing pada pengelolaan hutan desa kolaboratif di tingkat tapak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H., H. Berliani, G. Hardiyanto, Suwito, dan D.K. Sakti. 2015. PEMBERDAYAAN Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan. Jakarta: The Partnership for Governance Reform.
- Ambiyar dan Muharika. 2019. Metodologi Penelitian Evaluasi Program. Bandung: Alfabeta.
- Aminah, S. 2016. Kerusakan Hutan Rawa Gambut di Semenanjung Kampar: Studi tentang MNCs dan Negara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1): 63-68.
- Amri, M. dan H. Susanto. 2020. Survei dan Indeks Perhutanan Sosial: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Hutan. Jakarta: Katadata Insight Center.
- Apriandana, F., R. Safe'i, I.G. Febryano dan H. Kaskoyo. 2021. Kinerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ulin*, 5(1): 17-27.
- Bathin, T. 2006. Pendidikan Orang Dewasa sebagai Basis Pendidikan Non-Formal. *Jurnal Teknodik*, 10(19): 156-173.
- Budiawan, J. 2018. Pendidikan Orang Dewasa (*Andragogy*). *Jurnal Qalamuna*, 10(2): 107-135.
- Djogo, T., Sunaryo, D. Suharjito dan M. Sirait. 2003. Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia.
- EcoNusantara Lestari. 2023. Laporan Kunjungan Belajar Masyarakat Pengelola Hutan Desa Semenanjung Kampar ke Dusun Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo Prov. Jambi. Bogor: Eco Nusantara Lestari.
- Hasanah, H. 2016. Teknik-teknik Observasi. *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1): 21-46.
- Jaya, P.R.P. dan F. Ndeot. 2018. Penerapan Model Evaluasi CIPP dalam Mengevaluasi Program Layanan PAUD Holistik Integratif. *Jurnal Pernik*, 1(1): 10-25.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan [KPH] Tasik Besar Serkap. 2024. Sebaran Hutan Desa di Wilayah Kerja KPH Tasik Besar Serkap. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Komunitas Konservasi Indonesia [KKI] Warsi. 2023. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lanskap Bukit Panjang Rantau Bayur: Materi Pengenalan Program KKI Warsi dalam Kunjungan Belajar Masyarakat Pengelola Hutan Desa Semenanjung Kampar ke Dusun Lubuk Beringin Tahun 2023. Jambi: KKI Warsi.
- Kurniawati, E.W. 2021. Evaluasi Program Pendidikan Perspektif Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). *Jurnal Ghaita*, 2(1): 19-25.
- Lumbantobing, P. 2011. Manajemen Knowledge Sharing Berbasis Komunitas. Bandung: Knowledge Management Society Indonesia.
- Martin, E. 2020. Hutan Desa: Menghadirkan Negara dalam Tata Kelola Lokal, dalam Bersama Membangun Perhutanan Sosial. Editor: S. Ekawati, S. Suharti dan S. Anwar. Bogor: IPB Press.
- Rahayu, S. 2016. Komparasi Metode Field Trip dengan Metode Clustering dalam Pembelajaran Teks Cerita Petualangan. *Jurnal Konfiks*, 3(2): 147-156.
- Rahayu, V.P. dan H.N. Aly. 2023. Evaluasi Kurikulum. *Journal on Education*, 5(3): 5692-5699.
- Rahmat, A. 2018. Manajemen Pemberdayaan pada Pendidikan Nonformal. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Restorasi Ekosistem Riau [RER]. 2018. Laporan Kemajuan 2017 Restorasi Ekosistem Riau: Masyarakat, Iklim dan Keanekaragaman Hayati. Jakarta: Restorasi Ekosistem Riau (RER).
- Riane, J.P. 2019. Tata kelola Usahatani dalam Perspektif Kelompok Tani Karoong Desa Talikuran Kecamatan Sonder. *Journal of The Studies of Social Science*, 1(1): 1-6.
- Rifa'i, A. 2019. Konsep Pendidikan Pembebasan Mansour Fakhri. *Jurnal Kelola*, 4(2): 87-100.
- Sudarmanto, B.A. 2020. *Field Trip Instructional Method in Folktales Narrative Writing*. *Jurnal Bidar*, 10(1): 45-58.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta.
- Sunhaji. 2013. Konsep Pendidikan Orang Dewasa. *Jurnal Kependidikan*, 1(1): 1-11.
- Syarif, A. 2011. Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Orang Dewasa. Binuang: Balai Besar Pelatihan Pertanian Departemen Pertanian.

- Turrohmah, A. 2016. Implementasi Pembelajaran Partisipatif pada Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah di Salatiga. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Winaryati, E., M. Munsarif, Mardiana dan Suwahono. 2021. Model-model Evaluasi: Aplikasi dan Kombinasinya. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Wulandari, T. 2020. Teori Progresivisme John Dewey dan Pendidikan Partisipatif dalam Pendidikan Islam. *Jurnal At-Tarbawi*, 5(1): 71-86.
- Yuniati, S. dan A. Santosa. 2018. Pengelolaan Kawasan Hutan Kolaboratif. Jakarta: USAID Lestari.
- Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zubaidi, M. 2019. Pembelajaran Orang Dewasa: Teori dan Implementasi. Gorontalo: UNG Press.
- Zulkarnain, R., M. Firdaus dan W. Wirman. 2023. Kampanye Lingkungan pada Program Restorasi Ekosistem Riau (RER) Hutan oleh Grup April di Semenanjung Kampar. *Jurnal NeoRespubica*, 4(2): 285-300.